

Prabowo Minta Biaya Haji

Dari Halaman 1

Sumedang, Jawa Barat, Selasa (21/1). Pada musim Haji 2025, pemerintah dan DPR telah menyetujui biaya perjalanan ibadah haji

(Bipih) 2025 yang ditanggung jemaah berjumlah Rp55.431.750,78 juta (Rp55,4 juta). Jumlah itu setara 62 persen dari biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2025 yang ditetapkan sebesar Rp89.410.258,79 (Rp89,4 juta). Angka BPIH ini mengalami penurunan sebesar

Rp4 juta dari nilai BPIH tahun 2024 lalu sebesar Rp93.410.286.

Sementara Bipih yang ditanggung langsung jemaah juga mengalami penurunan sebesar Rp614.422 dari Bipih 2024 sebesar Rp 56.046.172. **(cnni/js)**

26 Maret - 8 April Resmi Libur

Dari Halaman 1

Edaran Bersama tentang Pembelajaran di Bulan Ramadan. Edaran diteken pada 20 Januari oleh Mendikdasmen Abdul Mu'ti, Mendagri Tito Karnavian dan Menag Nasaruddin Umar.

Edaran ditujukan kepada kepala daerah, kepala dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota, kepala kantor wilayah Kemenag provinsi dan kepala kantor kementerian kabupaten/kota.

"Tanggal 26, 27, dan 28 Maret serta 2,3,4,7, dan 8 April 2025 merupakan libur bersama Idulfitri bagi sekolah/madrasah/ satuan pendidikan keagamaan," dikutip dari edaran, Selasa (21/1).

Selama libur Idulfitri, peserta didik diharapkan melaksanakan silaturahmi dengan keluarga dan masyarakat untuk meningkatkan persaudaraan dan persatuan.

Kegiatan pembelajaran di sekolah/madrasah/ satuan pendidikan keagamaan dilaksanakan kembali pada 9 April 2025.

Dalam edaran, pemerintah daerah diminta menyiapkan perencanaan kegiatan pembelajaran selama bulan Ramadan untuk dipedomani oleh sekolah.

Selain itu, pemerintah daerah diminta menyalurkan waktu pelaksanaan kegiatan pembelajaran di sekolah selama bulan Ramadan.

BELAJAR DI RUMAH

Pemerintah resmi menerbitkan surat edaran tentang pembelajaran selama Ramadan 1446 Hi-

rian/2025 M, di mana para siswa selama sepekan awal bulan suci itu akan melaksanakan kegiatan belajar di lingkungan rumah.

Hal itu diatur dalam Surat Edaran Bersama (SEB) yang diteken tiga menteri yakni Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti, Menteri Agama Nasaruddin Umar, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

"Siang ini sudah terbit sudah kami tanda tangan bertiga," kata Mendikdasmen Mu'ti kepada wartawan di lingkungan kantornya, Jakarta, Selasa (21/1).

Edaran yang diteken 20 Januari 2025 itu ditujukan kepada kepala daerah, kepala dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota, kepala kantor wilayah Kemenag provinsi dan kepala kantor kementerian kabupaten/kota.

Pada edaran itu diatur pada 27 Februari hingga 5 Maret 2025 para siswa akan melaksanakan kegiatan di lingkungan rumah alias tak bersekolah selama sepekan awal Ramadan.

"Tanggal 27 dan 28 Februari serta tanggal 3, 4, dan 5 Maret 2025, kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara mandiri di lingkungan keluarga, tempat ibadah, dan masyarakat sesuai penguasaan dari sekolah/ madrasah/ satuan pendidikan keagamaan," demikian dikutip dari SKB tersebut.

Lalu, para siswa kemudian kembali mengikuti pembelajaran ramadhan di sekolah pada 6-25 Maret 2025.

"Tanggal 6 sampai dengan tanggal 25 Maret

2025, kegiatan pembelajaran dilaksanakan di sekolah/ madrasah/ satuan pendidikan keagamaan. Selain kegiatan pembelajaran, selama bulan Ramadan diharapkan melaksanakan kegiatan yang bermanfaat untuk meningkatkan iman dan takwa, akhlak mulia, kepemimpinan, dan kegiatan sosial yang membentuk karakter mulia dan kepribadian utama," demikian tertulis di edaran itu.

Kemudian 26,27, dan 28 Maret serta tanggal 2,3,4,7, dan 8 April 2025, merupakan libur bersama Idulfitri bagi sekolah/madrasah/ satuan pendidikan keagamaan.

"Kegiatan pembelajaran di sekolah/madrasah/ satuan pendidikan keagamaan dilaksanakan kembali pada tanggal 9 April 2025," dikutip dari edaran tersebut.

MATERI PEMBELAJARAN

Pada edaran itu diatur pula materi pembelajaran selama Ramadan bagi siswa muslim maupun nonmuslim di sekolah.

"Bagi peserta didik yang beragama Islam dianjurkan melaksanakan kegiatan tadarus Alquran, pesantren kilat, kajian keislaman, dan kegiatan lainnya yang meningkatkan iman, takwa, dan akhlak mulia," demikian disebut dalam edaran itu.

Sementara itu, bagi peserta didik yang beragama selain Islam, dianjurkan melaksanakan kegiatan bimbingan rohani dan kegiatan keagamaan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.**(cnni/js)**

Banjir dan Longsor

Dari Halaman 1

Selasa (21/1).

Kabupaten dan kota yang dilanda banjir antara lain Kabupaten Pekalongan, Demak, Grobogan, Sragen, Temanggung, Banjarnegara, Batang, dan Kota Surakarta.

Tanah longsor di Kecamatan Petungkriono, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, menewaskan 17 orang hingga Selasa sore. Proses evakuasi korban masih berlangsung sampai saat ini.

Sementara banjir di Kabupaten Demak merendam tiga desa, mengakibatkan seratusan rumah terdampak. Banjir disebabkan tanggul Sungai Cabean jebol.

Menurut Camat Guntur Sukardjo di Demak, Selasa, jebolnya tanggul Sungai Cabean yang berbatasan dengan Kecamatan Karangawen tersebut terjadi pada Senin pukul 23.30 WIB.

Panjang tanggul yang jebol di Dusun Gatak tersebut diperkirakan 10-15 meter, sehingga mengakibatkan air masuk ke pemukiman di Desa Tlogoweru, kemudian meluas ke Desa Bogosari dan Guntur.

Untuk ketinggian genangan di perkampungan, kata dia, bervariasi antara 50-60 sentimeter.

Banjir di Grobogan memaksa puluhan warga dari dua desa di Kabupaten Grobogan, mengungsi. Banjir dipicu jebolnya tanggul Sungai Tuntang di lima titik, sehingga air menggenangi pemukiman warga dan akses jalan.

"Total yang terdampak untuk sementara ada 20 desa yang tersebar di delapan kecamatan di Kabupaten Grobogan," kata Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Grobogan Masrikan di Grobogan, Selasa.

Sebagian warga yang rumahnya tergenang banjir terpaksa mengungsi, di antaranya dari Desa Kalongan dan Karanganyar.

Sedikitnya dua perjalanan KA di wilayah Daop 4 Semarang, Jawa Tengah batal pada Selasa akibat banjir Grobogan merendam rel di petak antara Stasiun Gubug dan Stasiun Karangjati di Kabupaten Grobogan.

Manajer Humas PT KAI Daop 4 Semarang Franoto Wibowo mengatakan kedua KA yang dibatalkan tersebut masing-masing KA Kedungsepur relasi Semarang-Ngrombo dan KA Ambarawa Ekspres relasi Semarang-Surabaya.

Menurut dia, calon penumpang yang keretanya batal berangkat dapat mengurus pengembalian biaya tiket yang telah dibayarkan di stasiun.

"Bea tiket akan dikembalikan 100 persen," tambahnya.

Selain pembatalan dua KA, KAI juga melakukan perubahan pola operasional perjalanan. Ia menjelaskan rute perjalanan KA dari Semarang dengan tujuan Surabaya dan sebaliknya akan dialihkan ke rute yang tidak terkena banjir.

Rute perjalanan yang sebelumnya melintasi wilayah Gubug dan Brumbung dialihkan melalui wilayah Gambirangan-Gundih-Kedungjati.

Banjir di Sragen menengjang enam kecamatan sejak Senin (20/1) akibat luapan anak Sungai

Bengewang Solo.

Koordinator Public Safety Center (PSC) 119 Kabupaten Sragen Udayanti Proborini di Sragen, Selasa, mengatakan enam kecamatan terendam air antara lain Sragen Kota, Sidoharjo, Tanon, Sukodono, Sambungmacan, Ngrampal, dan Jenar.

Ia mengatakan enam kecamatan tersebut terendam sejak Senin (20/1) sore. Untuk di Sragen Kota, wilayah yang terdampak luapan anak sungai tersebut, yakni Dukuh Gabus RT 01 dan 02, Dukuh Tugu RT 01, 02, dan 03, serta di Desa Tangkil.

Di wilayah tersebut, katanya, ketinggian genangan air di jalan mencapai 20 sentimeter. Genangan juga terjadi di lahan pertanian. Selanjutnya, di Kecamatan Tanon genangan air terjadi di Dukuh Kalikobok RT 16 dan 17.

"Di Desa Tanon ketinggian air sekitar 100 sentimeter. Akses jalan Tanon-Kalikobok sempat tidak bisa dilalui, karena air cukup tinggi," katanya.

Di Kecamatan Sukodono genangan air terjadi di Dukuh Weru RT 17 dan 18, serta Desa Juwok. Ia mengatakan ketinggian air sempat mencapai 150 sentimeter. "Ada satu bayi dievakuasi ke rumah saudara di sekitar Mondokan," katanya.

Di Kecamatan Jenar, banjir menggenangi di Dukuh Patoman RT 01, Dukuh Karang RT 02, dan di Dukuh Tawang RT 03. Ia mengatakan genangan air yang masuk ke jalanan dan perumahan warga mencapai ketinggian 150 sentimeter. **(cnni/js)**

Polisi Tewas Ditembak

Dari Halaman 1

meninggal dunia di lokasi kejadian.

"Polres Puncak Jaya bersama Satgas Ops Damai Cartenz-2025 telah bergerak ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) untuk mengevakuasi korban," ujarnya dalam keterangan tertulis.

Ia menambahkan saat ini jenazah korban sudah berhasil dievakuasi dan dibawa ke RSUD Mulia untuk menjalani proses visum. Faizal

mengatakan rencananya jenazah akan langsung diterbangkan ke Jayapura untuk dimakamkan.

"Kami memastikan keamanan masyarakat tetap terjaga. Saat ini, langkah-langkah investigasi sedang dilakukan untuk mengungkap pelaku dan motif di balik aksi ini," tuturnya.

Sebelumnya satu anggota Satgas Damai Cartenz Briptu Iqbal Anwar Arif juga menjadi korban penembakan oleh KKB. Iqbal meninggal dunia usai tertembak di bagian leher saat sedang melakukan patroli rutin di Yalimo,

Papua.

Insiden penembakan terhadap Iqbal terjadi pada Jumat (17/1) pukul 16.30 WIT, di sekitar PT. AMO. Ketika itu tim patroli yang terdiri dari dua kendaraan sempat berhenti saat menemukan papan melintang di sebuah tanjakan.

"Saat kendaraan pertama berhenti untuk memeriksa, tembakan tiba-tiba datang dari sisi kanan tebing. Salah satu peluru mengenai Briptu Iqbal yang langsung dilarikan untuk mendapatkan pertolongan," tuturnya.**(cnni/js)**

Pemerintah Gelontorkan

Dari Halaman 1

berbagai infrastruktur yang juga telah selesai 100%. Tapi ada juga yang masih on going atau berlanjut," lanjut AHY.

AHY mengungkap Prabowo telah menyetujui anggaran Rp 48,8 triliun untuk keberlanjutan IKN. AHY memastikan setiap tahapan yang dijalankan akan dikawal ketat.

"Memang kita fokus pada pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan, di sini nanti kita berharap ditahap kedua 2025-2029 dan tadi Bapak Presiden Prabowo Subianto sudah menyampaikan dan menegaskan bahwa sudah di-approve anggaran untuk kelanjutan pembangunan

IKN itu Rp 48,8 triliun untuk 5 tahun ke depan. Tentu akan dibagi dalam tahapan yang harus dikawal dengan ketat," ujarnya.

AHY menyebutkan anggaran itu bersumber dari APBN dan non-APBN. Sejauh ini, pemerintah masih berharap pihak swasta untuk berkontribusi dan terintegrasi dengan baik.

"Tentunya ada bersumber dari APBN, ada juga bersumber non-APBN, inilah kebersamaan kerja sama yang baik antara pemerintah dan badan usaha. Kita juga mengharapkan dunia swasta ini bisa berkontribusi secara positif, dan terintegrasi dengan baik," ujarnya.

AHY mengatakan pemerintah memprioritaskan pembangunan gedung pemerintahan

terutama legislatif dan yudikatif. Pihaknya akan melakukan penyesuaian ulang secara teknis terkait pembangunan gedung tersebut.

"Anggaran tersebut dipersiapkan untuk dialokasikan agar kami, khususnya OIKN, bisa menyelesaikan proyek pembangunan fasilitas atau gedung-gedung yang digunakan untuk parlemen, dan yudikatif," ujarnya.

"Dari rancangan awal yang sudah dimiliki kita lakukan review kembali, ada penyesuaian sana sini secara teknis dan pada saatnya nanti kita sudah bisa melanjutkan pembangunan dan mudah-mudahan bisa mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan," lanjut AHY. **(det/js)**

November 2024.

"Iya benar bang, mereka datang untuk diskusi dan melakukan konsultasi terkait persaingan-persaingan usaha dan sinergi BUMN," ujar Kepala KPPU Kanwil I Ridho Pamungkas, pada Sabtu (18/1/2025).

Namun, persoalan hukum yang menyeret Roby Haris terkait kasus penipuan dan pemalsuan dokumen, tidak menjadi konsen Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang ketika Roby Haris Cs mendataangi kantor KPPU Kanwil I Sumut.

"Kalau terkait masalah kasus penipuan dan pemalsuan dokumen, saya pernah baca di berita media. Namun karena tidak terkait dengan persaingan usaha, jadi tidak menjadi konsen saya," papar Kepala KPPU Kanwil I Ridho Pamungkas. **(adam)**

Perguruan Tinggi Bakal...

Dari Halaman 1

dang-undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba).

Hal ini terungkap dalam Rapat Pleno Badan Legislati DPR RI yang membahas Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (20/1).

Ketua Baleg DPR RI, Bob Hasan mengungkapkan dalam rapat sebelumnya pada 14 Januari 2025 disepakati selain hilirisasi, pengelolaan pertambangan oleh ormas keagamaan menjadi prioritas untuk diatur dalam UU Minerba.

Selain itu, Bob menyampaikan pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) pada perguruan tinggi juga menjadi salah satu prioritas.

"Demikian pula juga dengan (pengelolaan tambang oleh) perguruan tinggi ya dan tentunya UKM usaha kecil," ujar anggota Fraksi Partai Gerindra itu.

Ketentuan tentang perguruan tinggi bisa mengelola tambang hadir dalam Pasal 51A dalam draf revisi UU Minerba, yang berbunyi:

(1) Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Mineral logam dapat diberikan kepada perguruan tinggi dengan cara prioritas.

(2) Pemberian dengan cara prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:

- luas WIUP Mineral logam.
- akreditasi perguruan tinggi dengan status paling rendah B, dan/atau
- Peningkatan akses dan layanan pendidikan bagi masyarakat.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian WIUP Mineral logam dengan cara prioritas kepada perguruan tinggi diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

BERPOTENSI TIMBULKAN MASALAH

Keputusan penetapan perguruan tinggi sebagai pengelola tambang menimbulkan banyak pendapat. Anggota Baleg DPR RI, Umbu Kabunang Rudi Yanto Hunga menyatakan kebijakan ini bisa berpotensi menimbulkan masalah baru.

"Bagaimana pemerintah bisa memberikan kewenangan kepada universitas atau perguruan tinggi, yang jumlahnya ribuan di Indonesia? Ini bisa memunculkan masalah baru," katanya dikutip dari E-Media DPR RI, Selasa (21/1).

Alih-alih memberikan izin tambang, Umbu mengusulkan agar perguruan tinggi diberikan dana langsung bila ingin mendukung peningkatan mutu pendidikan. Bantuan dana langsung ini dinilai lebih relevan, karena Indonesia belum mengatur undang-undang khusus tentang pengelolaan tambang di ranah universitas. **(det/js)**

Trump Resmi Jadi ...

Dari Halaman 1

menjadi presiden AS kedua yang come back ke Gedung Putih dan menjadi presiden pertama yang menandatangani status terpidana (felon) saat menjabat.

Sekitar sepekan sebelum pelantikan presiden, pengadilan di New York memvonis Trump bersalah atas kasus suap ke bintang porno Stormy Daniels.

Trump terbukti berupaya menutupi pemberian suap ke Daniels agar tetap bungkam soal hubungan mereka jelang Pemilu 2016.

Hakim Pengadilan New York, Juan Merchan, memutuskan Trump memang bersalah. Namun, dia tak memberi hukuman penjara atau denda terkait kasus ini.

"Belum pernah sebelumnya pengadilan ini menghadapi situasi yang begitu unik dan luar biasa," ujar Merchan dalam persidangan pada Jumat (10/1).

Dia lalu berkata, "Satu-satunya hukuman yang sah untuk memungkinkan putusan bersalah tanpa mengganggu posisi tertinggi di negara ini adalah vonis tanpa syarat."

Meski tak menerima hukuman penjara dan sanksi lain, putusan hakim tetap memalukan bagi Trump.

Trump juga kecewa dengan vonis itu karena terjadi hanya beberapa hari sebelum pelantikan.

"Pengalaman ini sangat mengerikan. Saya pikir ini merupakan kemunduran besar bagi New York dan sistem pengadilan di New York," ujar Trump dalam pernyataan panjang lebar sebelum vonis dijatuhkan.

"Ini dilakukan untuk merusak reputasi saya agar saya kalah dalam pemilu-jelas itu tidak berhasil," katanya menambahkan.**(cnni/js)**



Kepekaan Prabowo

Dari Halaman 1

ibadah ini.

Permintaan ini bisa menjadi indikasi bahwa pemerintah ingin memastikan penggunaan dana haji lebih efisien, transparan, dan bebas dari pemborosan.

Tekanan terhadap Peningkatan Akuntabilitas: Hal ini juga bisa mencerminkan upaya meningkatkan pengawasan terhadap lembaga yang mengelola dana haji.

Mengurangi Beban Finansial Masyarakat: Dalam kondisi ekonomi global yang menantang, pemerintah mungkin ingin mengurangi beban pengeluaran masyarakat, termasuk untuk ibadah haji.

Pengelolaan Subsidi atau Investasi: Jika dana haji dikelola dengan baik melalui investasi, hasilnya bisa digunakan untuk menekan biaya perjalanan.

Menunjukkan Kepedulian terhadap Agama. Permintaan ini bisa menjadi sinyal bahwa pemerintah ingin menunjukkan komitmennya dalam mendukung umat Muslim menjalankan rukun Islam kelima.

Menguatkan Legitimasi Politik: Kebijakan ini juga bisa dimaknai sebagai langkah untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Menyeimbangkan Biaya dan Layanan. Permintaan untuk menurunkan biaya haji harus tetap mempertimbangkan kualitas layanan, seperti akomodasi, transportasi, dan kesehatan jamaah.

Koordinasi dengan Arab Saudi. Faktor eksternal seperti kebijakan Arab Saudi terkait biaya haji juga memengaruhi kemungkinan penurunan ini.

Permintaan ini pada dasarnya adalah upaya positif untuk meringankan beban masyarakat, tetapi implementasinya harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Penurunan biaya haji hanya akan berhasil jika diiringi dengan pengelolaan yang efisien, transparansi, dan tanpa mengorbankan kualitas layanan bagi jamaah.